

LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS REVIU SKI TERHADAP PENILAIAN MANDIRI
MENUJU WBK/ WBBM NASIONAL
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG

A. Pendahuluan

Berdasarkan hasil laporan Reviu SKI terhadap Penilaian Mandiri menuju WBK/ WBBM Nasional di lingkungan BKK Kelas I Bandung, terdapat catatan hasil telaahan isian LKE yang diisi mandiri oleh setiap pokja mengenai kegiatan yang sudah dan belum dilaksanakan sepanjang tahun 2024. Terhadap kegiatan yang belum dilaksanakan tersebut, tim memberikan waktu untuk melakukan tindak lanjut perbaikan dokumen administrasi maupun aplikasi digitalisasi sebagai pembaharuan data penilaian mandiri WBK Nasional BKK Bandung.

Dokumen ini disusun untuk menindaklanjuti progres perbaikan yang sudah dilakukan oleh masing-masing pokja selama tahun 2024 dan tetap melakukan monitoring terhadap dokumen yang belum bisa ditindaklanjuti di tahun 2024. Kegiatan tindak lanjut terdiri dari LKE pemenuhan maupun reform.

B. Tujuan

Tujuan dari pembuatan laporan tindak lanjut atas reviu SKI terhadap penilaian mandiri menuju WBK/WBBM Nasional untuk mengetahui sejauh mana langkah perbaikan yang sudah dilakukan dan diusahakan masing-masing pokja pada kegiatan zona integritas di tahun 2024 serta melakukan monitoring atas pencapaian yang masih berlangsung.

C. Ruang Lingkup

Laporan tindak lanjut ini dilakukan atas hasil laporan reviu SKI terhadap penilaian mandiri WBK/WBBK Nasional BKK Bandung.

D. Hasil

Berdasarkan catatan hasil reviu penilaian mandiri LKE Implementasi WBK BKK Bandung sepanjang tahun 2024, tindak lanjut yang sudah dilaksanakan masing-masing pokja adalah sebagai berikut:

Pokja 1 (Manajemen Perubahan)

Pada dasarnya tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Pokja 1 adalah melakukan kompilasi dari tugas di pokja 2 s.d. pokja 6. Sehingga tindak lanjut dari pokja 1 yaitu memastikan pokja-pokja lainnya mengumpulkan laporan kegiatan, laporan monitoring evaluasi, dan laporan tindak lanjut monitoring evaluasi sesuai ketentuan. Hal tersebut baru dapat diketahui hasilnya di tahun 2025. Untuk reform yang sudah ditindaklanjuti yaitu:

1. SOP yang sesuai dengan slogan budaya baru sudah dipilih.

Pokja 2 (Penataan Tatalaksana)

Secara keseluruhan, pokja 2 sudah melakukan tindak lanjut perbaikan dari catatan LKE tahun 2024. Adapun point tindak lanjut yang sudah dilaksanakan yaitu:

1. SK tim pengelola aplikasi dan website sudah disusun.
2. Buku manual aplikasi / *manual book* sudah disusun.
3. Sudah melakukan penambahan fitur logbook di aplikasi SIMPLY (<https://simply.bkkbandung.net/home>).
4. Daftar aplikasi sudah ditampilkan di website BKK Bandung (<https://bkkbandung.net/#>).
5. Laporan tindak lanjut sudah dipisahkan dari laporan monitoring evaluasi.
6. Struktur organisasi PPID sudah ditampilkan di website BKK Bandung.
7. Monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik sudah ditindaklanjuti.
8. Untuk reform, aplikasi terkait pelayanan publik sudah diintegrasikan.

Pokja 3 (Penataan Sistem Manajemen Aparatur)

Pokja 3 sudah melakukan tindak lanjut perbaikan atas catatan revidi LKE tahun 2024. Point tindak lanjut tersebut yaitu:

1. Upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai terpenuhi 100%.
2. Implementasi seluruh aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku telah ditetapkan organisasi.

Pokja 4 (Penguatan Akuntabilitas)

Pokja 4 sudah memenuhi nilai 100%. Meskipun demikian ada hal yang harus ditindaklanjuti, dan yang sudah ditindaklanjuti adalah:

1. Sertifikat pelatihan dari anggota baru dalam tim penyusun SAKIP sudah diperbaharui.

Pokja 5 (Penguatan Pengawasan)

Hal yang sudah ditindaklanjuti oleh pokja 5 untuk perbaikan nilai LKE yaitu sebagai berikut:

1. Pemenuhan SOP Public Campaign seharusnya yang dimaksud adalah SOP gratifikasi dan sudah ditindaklanjuti.
2. Alur pengaduan berupa scan barcode sudah diletakkan di tempat pelayanan bahkan disediakan ruangan khusus.
3. Inovasi pengaduan masyarakat dengan judul LARAS, di dalamnya terdapat layanan baru sebagai inovasi yaitu layanan pengaduan menggunakan Whatsapp.
4. Aplikasi sudah digabung dalam satu aplikasi dengan nama SIMPLY (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan BKK Kelas I Bandung).
5. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan sudah ditindaklanjuti oleh unit kerja.

Pokja 6 (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)

Kualitas pelayanan publik yang sudah ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

1. Dokumen standar pelayanan sudah dibuat.
2. Standar pelayanan sudah dipublikasikan di website dan media sosial.
3. Reviu dan perbaikan standar pelayanan melibatkan stakeholder.
4. Informasi pelayanan sudah terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional.
5. Kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi sudah disusun.
6. Dokumen sistem pemberian kompensasi layanan tidak sesuai standar sudah dibuat.
7. Survei kepuasan masyarakat sudah dilakukan rutin setiap hari. Dibat laporan bulanan.

Dari keseluruhan unsur pemenuhan yang harus ditindaklanjuti, ada beberapa hal yang belum bisa ditindaklanjuti. Yaitu diantaranya:

1. Rencana kerja sosialisasi dan pelatihan berkala masih disusun.
2. Inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan direplikasi belum terpenuhi.

Dengan demikian, berdasarkan hasil tindak lanjut perbaikan penilaian mandiri LKE Implementasi WBK BKK Kelas I Bandung tahun 2024, Nilai LKE akhir untuk tahun 2024 sebagai berikut:

Penilaian			NILAI REVIU AWAL			NILAI REVIU AKHIR		
A	PENGUNGKIT		Bobot	Nilai	%	Bobot	Nilai	%
	I	PEMENUHAN	60.00	54.93		60.00	57.41	95.68%
			30.00	27.55	91.82%	30.00	29.53	98.42%
	1	Manajemen Perubahan	4.00	3.03	75.64%	4.00	4.00	100%
	2	Penataan Tatalaksana	3.50	3.38	96.43%	3.50	3.50	100%
	3	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5.00	4.68	93.68%	5.00	5.00	100%
	4	Penguatan Akuntabilitas	5.00	5.00	100.00%	5.00	5.00	100%
	5	Penguatan Pengawasan	7.50	7.22	96.25%	7.50	7.22	96.25%
	6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5.00	4.24	84.88%	5.00	4.81	96.13%
	II	REFORM	30.00	27.38	91.28%	30.00	27.38	91.28%
	1	Manajemen Perubahan	4.00	3.67	91.75%	4.00	3.67	91.75%
	2	Penataan Tatalaksana	3.50	3.00	85.71%	3.50	3.50	100%
	3	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5.00	4.25	85.00%	5.00	4.25	85.00%
	4	Penguatan Akuntabilitas	5.00	5.00	100.00%	5.00	5.00	100.00%
	5	Penguatan Pengawasan	7.50	6.88	91.67%	7.50	6.88	91.67%
	6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5.00	4.59	91.75%	5.00	4.59	91.75%
TOTAL PENGUNGKIT				57.41	95.68%		54.93	91.55%
B	HASIL		40.00	34.70		40.00	34.70	
	I	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22.50	18.67	82.98%	22.50	18.67	82.98%
	a	Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17.50	16.17	92.40%	17.50	16.17	92.40%
	b	Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian Kinerja Sebelumnya	5.00	2.50	50.00%	5.00	2.50	50.00%
	II	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17.50	16.03	91.60%	17.50	16.03	91.60%
	a	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik/ IPKP)	17.50	16.03	91.60%	17.50	16.03	91.60%
TOTAL HASIL				34.70	86.75%		34.70	86.75%
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI			NILAI REVIU AWAL			NILAI REVIU AKHIR		
				89.63		92.11		

E. Penutup

Dengan hasil ini, secara keseluruhan proses pembangunan zona integritas (ZI) di lingkungan BKK Kelas I Bandung semakin meningkat. Diharapkan dengan meningkatnya nilai evaluasi reformasi birokrasi ini dapat mewujudkan BKK Bandung meraih WBK Nasional.

Demikian laporan tindak lanjut reviu SKI terhadap Penilaian Mandiri Menuju WBK/ WBBM nasional dalam rangka percepatan pembangunan zona integritas di lingkungan BKK Bandung ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui,
Ketua SKI BKK Kelas I Bandung

Yani Dwiyuli Setiani, SKM, MKM
NIP. 197107301993032001

Ketua Pokja 1 WBK

Rifi Adi Sucipto, SKM, MKM
NIP. 198509082010121002

Bandung, 28 Februari 2025

Penyusun Laporan,
Anggota SKI

Amanda Cherkayani Sejati, SKM, MPH
NIP. 199206092015032005

Ryan Juliansyah
NIP. 198907252015031002